



Perbaiki RTLH Terus Dikebut

UMBULHARJO (MERAPI) - Perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Yogyakarta tahun ini sudah menyelesaikan sekitar 40 persen. Pembangunan RTLH yang dilakukan secara swakelola bersama masyarakat itu kini memasuki termin kedua dan terus dikebut.

Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Yunita Rahmi Hapsari mengutarakan, perbaikan RTLH dibagi menjadi tiga termin karena mengikuti aturan pencairan anggaran. Pada termin pertama telah diselesaikan 40 persen. Sedangkan pada termin kedua dan ketiga pencairan dan target realisasi masing-masing 30 persen.

"Sekarang masuk di pelaksanaan termin kedua. Di setiap lokasi seperti itu capaian tiap termin. Kendalanya pencairan anggaran RTLH ini aturannya dibuat tiga termin, sehingga waktunya lebih lama," kata Yunita, Senin (24/9).

Pada tahun 2018 total ada sekitar 502 RTLH yang diperbaiki tersebar di berbagai kelurahan di Kota Yogyakarta. Rinciannya sebanyak 207 RTLH Kelurahan Muja Muju, Sorosutan, Bener dan Tegalrejo dengan Dana Alokasi Khusus APBN. Sedangkan Pemda DIY akan menangani 203 RTLH di berbagai kelurahan dan APBD Kota Yogyakarta 92 RTLH di Kelurahan Patangpuluhan, Pakuncen, Notoprajan, Giwangan, Tahunan, Prenggan, Purbayan dan Rejowinangun.

"Kebanyakan rumah tidak layak kare-

na di bagian atap bocor, struktur dang tulangan bangunan tidak ada," ujarnya.

Persoalan lainnya dari segi kapasitas hunian rumah yang belum layak. Dia menjelaskan, idealnya bangunan tempat tinggal 7 meter persegi/orang. Jika luas rumah 21 meter persegi maka idealnya dihuni 3 orang. Di Kota Yogyakarta dengan luasan 21 meter persegi, lanjutnya, dihuni 7-8 orang. Kondisi itu terjadi karena kendala lahan terbatas dan bantuan RTLH kurang mendukung untuk perluasan bangunan secara vertikal.

"Kalau mau diperluas, lahannya tidak ada karena padat penduduk. Dikembangkan bangunan ke atas seperti membangun rumah baru. Dengan dana bantuan RTLH yang ada tidak cukup. Makanya itu yang masih menjadi pekerjaan rumah kami," terang Yunita.

Dia mengatakan perbaikan RTLH dengan DAK menggunakan pagu anggaran berkisar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta untuk kategori rusak sedang dan berat. Untuk perbaikan RTLH dengan APBD sekitar Rp 12 juta tiap rumah dan masih dipotong pajak.

"Untuk dana perbaikan RTLH dari dana APBN masuk ke rekening warga penerima bantuan. Tapi dana itu hanya



MERAPI-TRI DARMIYATI

Pengendara motor melintas di pemukiman bantaran Sungai Code. Perbaikan rumah tak layak huni terus dilakukan di Kota Yogya.

bisa digunakan untuk transfer pembayaran membeli material bangunan di toko bangunan yang sudah ditunjuk atau bekerja sama," paparnya.

Pengerjaan rehabilitasi RTLH dilakukan swakelola bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan warga penerima bantuan. Dia menuturkan warga penerima bantuan RTLH bisa mengerjakan sendiri atau LMPK dapat melaksanakan dengan men-

cari tukang bangunan. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu nantinya oleh LMPK.

Dengan perbaikan sejumlah RTLH tahun 2018 maka menyisakan 2.133 RTLH di Kota Yogyakarta. Ditambahkan untuk perbaikan RTLH tahun depan akan mengusulkan perbaikan 200 RTLH dengan APBD, 60 RTLH diusulkan menggunakan APBD DIY dan 220 RTLH ke Kementerian Pekerjaan Umum. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005